

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur penyetoran dan pencatatan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Padang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Proses tersebut dimulai dari perhitungan tagihan berdasarkan data gaji ASN, penyampaian tagihan kepada pemerintah daerah, penerimaan pembayaran melalui bank, hingga pencatatan transaksi ke dalam sistem informasi perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan memanfaatkan aplikasi SAP sebagai sarana utama untuk mendukung kegiatan pencatatan dan pengelolaan data iuran. Penggunaan sistem tersebut membantu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengolahan data, serta mendukung ketepatan informasi yang dihasilkan.

Proses pencatatan juga didukung oleh berbagai dokumen administrasi seperti rekapitulasi data gaji ASN, rekening koran bank, SP2D, BPN, serta voucher pengakuan piutang dan voucher realisasi iuran. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai dasar dalam proses verifikasi dan pencatatan transaksi yang dilakukan perusahaan.

Walaupun secara umum proses penyetoran dan pencatatan telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa hambatan yang ditemui, seperti keterlambatan pengiriman dokumen dari pemerintah daerah, perbedaan pembulatan nominal transaksi, serta gangguan jaringan pada sistem SAP. Namun demikian, perusahaan

telah melakukan berbagai langkah penanganan untuk meminimalkan dampak dari kendala tersebut sehingga kegiatan operasional tetap dapat berjalan dengan lancar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyetoran dan pencatatan iuran JKK dan JKM pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Padang, yaitu:

1. Perusahaan perlu terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar proses pembayaran iuran dan pengiriman dokumen pendukung dapat dilakukan tepat waktu sehingga tidak menghambat proses pencatatan administrasi.
2. Pemanfaatan sistem SAP sebaiknya terus ditingkatkan melalui pengembangan fitur dan optimalisasi penggunaan sistem agar proses pengelolaan data menjadi lebih efektif, cepat, dan akurat.
3. Rekonsiliasi data antara Bidang Administrasi Keuangan dan Bidang Layanan serta Kepesertaan perlu dilakukan secara berkala guna memastikan kesesuaian data peserta dengan data pembayaran yang diterima perusahaan.
4. Perusahaan diharapkan terus meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan jaringan dan server, sehingga risiko gangguan sistem dapat diminimalkan.
5. Ketelitian dan konsistensi dalam proses penyetoran maupun pencatatan iuran perlu terus dipertahankan agar pengelolaan dana jaminan sosial dapat berjalan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.